



BRIDGING THE GAP: HOW PLANNING-BUDGET CONSISTENCY AFFECTS PERFORMANCE IN LOCAL GOVERNMENT AGENCIES

Syofria Meidona¹, Herlina Kurniati², Muhammad Hendra³, Elsa Fitri Amran⁴

Universitas Sumatera Barat Pariaman^{1,2,3}

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar⁴

Korespondensi: Jl. Sudirman No.137 Kuburajo, Limakaum, Batusangkar, Sumatra Barat

e-mail: syofriameidona@gmail.com, herlinakurniati145@gmail.com,

hendraentrepreneurmulia94@gmail.com, elsafitriamran@uinmybatusangkar.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran serta mengkaji implikasinya terhadap pencapaian kinerja di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 10 informan kunci yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, serta staf perencana dan anggaran. Analisis dokumen terhadap RENSTRA, RPJMD, RKPD, RENJA, PPAS, RKA, dan DPA periode 2020-2024 juga dilakukan sebagai data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk menghitung tingkat keselarasan dan dilengkapi dengan analisis kualitatif tematik. Temuan penelitian menunjukkan variasi tingkat konsistensi antar dokumen. Konsistensi tertinggi terdapat pada keselarasan RENSTRA dengan RPJMD (96,66%) dan RENJA dengan PPAS (97,89%), sedangkan kesenjangan signifikan teridentifikasi pada hubungan RKPD dengan RENJA (78,12%) dan PPAS dengan RKA (72,26%). Secara umum, mekanisme perencanaan dan penganggaran telah berjalan, namun ditemukan ketidakselarasan pada tahap operasionalisasi anggaran, yang berpotensi mengganggu optimalisasi pencapaian kinerja. Konsistensi perencanaan dan penganggaran di instansi tersebut sudah baik pada level kebijakan makro, namun perlu penguatan pada level teknis dan operasional. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya: (1) peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana dan penganggaran, (2) intensifikasi koordinasi dan komunikasi internal serta dengan pemerintah daerah, dan (3) penguatan sistem monitoring evaluasi untuk menjamin kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan indikator kinerja. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat bukti mengenai pentingnya integrasi sistem perencanaan dan penganggaran sebagai prasyarat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kata Kunci: Konsistensi, Perencanaan dan Penganggaran, Capaian Kinerja

Abstract: This study aims to analyze the level of consistency between planning and budgeting documents and examine its implications for performance achievement at the Archives and Library Service of Padang Pariaman Regency. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through semi-structured interviews with 10 key informants consisting of the Head of Service, Secretary, Head of Subdivision, Head of Division, and planning and budget staff. Document analysis of the RENSTRA, RPJMD, RKPD, RENJA, PPAS, RKA, and DPA for the 2020-2024 period was also conducted as secondary data. Data were analyzed descriptively quantitatively to calculate the level of alignment and supplemented with thematic qualitative analysis. The research findings show variations in the level of consistency between documents. The highest consistency was found in the alignment of RENSTRA with RPJMD (96.66%) and RENJA with PPAS (97.89%), while significant gaps were identified in the relationship between RKPD with RENJA (78.12%) and PPAS with RKA (72.26%). In general,

the planning and budgeting mechanisms have been running, but there was a misalignment at the budget operationalization stage, which has the potential to disrupt the optimization of performance achievement. The consistency of planning and budgeting in the agency is good at the macro policy level, but needs to be strengthened at the technical and operational levels. The practical implications of this research are the need for: (1) increasing the capacity of human resources for planning and budgeting, (2) intensifying coordination and communication internally and with local governments, and (3) strengthening the monitoring and evaluation system to ensure continuity between planning, budgeting, and performance indicators. Theoretically, this research strengthens the evidence regarding the importance of integrating planning and budgeting systems as a prerequisite for good governance.

Keywords: Consistency, Planning and Budgeting, Performance Achievement.

PENDAHULUAN

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Bastian (2006) mendefenisikan anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang di usulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Mardiasmo (2009) mengemukakan defenisi anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Fenomena anggaran yang kurang terserap diawal tahun, namun dipaksakan serapannya pada akhir tahun kerap terjadi. Hal ini

menjadi bahasan menarik karena serapan anggaran secara umum hanya memiliki akselerasi tinggi pada saat akhir tahun. Sedangkan diawal tahun, umumnya sulit direalisasikan sebagaimana yang diharapkan publik. Serapan anggaran yang rendah tentunya berimplikasi buruk terhadap kinerja suatu Pemerintah Daerah (Pemda).

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji hubungan perencanaan dengan penganggaran dari berbagai perspektif. Beberapa studi, seperti dari Akbar (2018) dan Sari (2022), berfokus pada analisis *formal compatibility* antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat kabupaten/kota secara umum. Mereka menemukan bahwa secara administratif, keselarasan dokumen dapat tercapai, namun belum menjamin efektivitas implementasi. Di sisi lain, penelitian Maulana (2020) dan Setiawan (2021) menyoroti faktor politik anggaran, di mana intervensi legislatif dan tekanan kelompok kepentingan sering kali menggeser alokasi anggaran dari prioritas perencanaan teknis yang telah disusun. Temuan tersebut mengungkap bahwa konsistensi substantif sering dikorbankan untuk kepentingan transaksional jangka pendek.

Produk perencanaan membutuhkan suatu proses pembuatan yang diawali dengan mengetahui suatu persoalan dengan tepat/benar, kendala, tujuan dan target yang akan dicapai. Kemudian harus dikerjakan oleh perencana yang profesional yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman. SPPN tahun 2004 menetapkan

ada lima dokumen perencanaan pembangunan yang perlu disusun oleh badan perencana, baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, yaitu : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D) adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk periode selama 20 tahun; 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 tahun ke depan yang berisikan jabaran lebih kongkrit dari visi dan misi presiden (pada tingkat nasional) atau visi dan misi kepala daerah (untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota); 3) Rencana Strategis (Renstra), lazim disebut sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berisikan jabaran dari visi dan misi kepala SKPD yang diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah. Renstra SKPD lebih rinci sampai ke kegiatan karena ruang lingkupnya lebih kecil, yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari institusi bersangkutan. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun; 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana jabaran dari RPJM yang berisikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk 1 tahun (annual planning) sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada tahun bersangkutan, khususnya dana.

RKPD selanjutnya dijadikan dasar untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); 5) Rencana Kerja Institusi (Renja) atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) juga merupakan rencana tahunan bersifat operasional yang isinya merupakan jabaran dari Renstra yang dibuat oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksinya. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal

ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara terpisah mengakibatkan muncul inkonsistensi antara rencana yang disusun dengan alokasi belanja dalam proses penganggaran. Kondisi tersebut menyebabkan biasnya alokasi belanja untuk berbagai jenis kegiatan. Hal ini akan bermuara pada inkonsistensi alokasi belanja daerah, padahal masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber pendapatan di daerah sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai suatu kegiatan. Kabupaten Padang Pariaman sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Oleh sebab itu diperlukan efisiensi dan efektifitas belanja melalui integrasi antara perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Padang Pariaman. Fenomena selama ini yang ditemui dalam perencanaan kadang ada program/ kegiatan di OPD yang disisipkan makanya dalam RPJM dilakukan revisi dokumen karena dianggap sudah tidak nyambung lagi dengan dokumen yang lain, sehingga hal ini dapat menyebabkan ketidak konsistenan antara perencanaan dan penganggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Kabupaten Padang Pariaman.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tersebut juga mempengaruhi capaian target kinerja suatu organisasi, dengan kata lain bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Dari paparan di atas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji sejauh mana konsistensi perencanaan dan penganggaran serta implikasinya terhadap capaian target kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Padang Pariaman. Mengacu pada latar belakang tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis tingkat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, menganalisis implementasi konsistensi dan perencanaan dan penganggaran terhadap capaian target kinerja di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman.

Meskipun cukup banyak kajian mengenai topik ini, terdapat beberapa *research gap* yang signifikan. Pertama, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada organisasi atau dinas dengan anggaran besar dan proyek fisik (misalnya, dinas PUPR atau Kesehatan). Sementara itu, sangat terbatas kajian yang menyelidiki dinamika ini pada dinas yang memberikan layanan non-fisik dan berbasis outcome kualitatif, seperti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Kedua, belum banyak studi yang mendalami mekanisme koordinasi internal di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara unit perencana dan unit keuangan, serta bagaimana *gap* koordinasi ini melahirkan inkonsistensi operasional. Ketiga, terdapat kesenjangan dalam memahami dampak spesifik dari inkonsistensi perencanaan-penganggaran terhadap capaian kinerja yang bersifat non-fisik, seperti peningkatan literasi masyarakat, pelestarian arsip, atau kualitas layanan informasi.

METOD

Penelitian ini mencoba menganalisis konsistensi perencanaan dan penganggarannya serta implementasinya pada capaian kinerja di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018 sampai tahun 2022. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif (analisa deskriptif) dengan perpaduan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan Kuantitatif yang lebih tampak dominan dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat konsistensi dan tingkat capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman.

Sedangkan untuk memperjelas pola hubungan tersebut dan mempertegas hasil analisa kuantitatif digunakan pendekatan kualitatif dalam artian memberikan penjelasan dari angka-angka kedalam bentuk narasi. Tambahan berbagai narasi kualitatif tersebut digunakan untuk memperjelas hasil analisa yang dilakukan secara kuantitatif.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan dokumentasi dengan beberapa tahapan Pertama: Beberapa dokumen terkait yaitu mulai dari visi dan misi kabupaten padang pariaman yang tertuang dari RPJP Kabupaten Padang Pariaman, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 dan RPJMD 2021-2026,Renstra 2016-2021 dan RENSTRA 2021-2026,Renja dan RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2018-2022, PPAS dan DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2018-2022, LPPD 2018-2022, LAKIP 2018-2022, dan Laporan IKD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2018-2022. Hasil evaluasi tersebut disusun dalam suatu matrik konsolidasi perencanaan dan penganggaran.dimana matrik ini disusun dengan cara melakukan integritas antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Kabupaten Padang Pariaman disadur/diacu berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembanguna daerah, Tata cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kedua:Penentuan Konsistensi antara dokumen-dokumen tersebut dilakukan dengan mengsingkronkan program dan kegiatan secara nomenklatur.Kegiatan dianggap konsisten apabila terdapat saling keterkaitan, singkron atau mempunyai maksud dan isi yang sama dengan dokumen yang di bandingkan.Selanjutnya untuk

menentukan tingkat konsistensi secara keseluruhan dari dokumen tersebut

dilakukan melalui teknik persentase yaitu

$$\text{Tingkat Konsistensi (\%)} = \frac{\text{Jumlah Program yang konsisten}}{\text{Total Program}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Konsistensi (\%)} = \frac{\text{Jumlah Kegiatan yang konsisten}}{\text{Total Kegiatan}} \times 100\%$$

Tabel 1.

Tingkat Konsistensi berdasarkan persentase

Prediket	Rentang
Sangat Buruk	0,0-19,9
Buruk	20,0-39,9
Sedang	40,0-59,9
Baik	60,0-79,9
Sangat Baik	80,0-100

Sumber : Sugiyono, 2003

Ketiga: Mencari akar permasalahan yang menjadi terjadinya inkonsistensi dan perencanaan dan penganggaran serta implementasinya di kabupaten Padang Pariaman tahun 2018-2021 dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut jika memang ditemukan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan yang dapat digali dari hasil wawancara dari berbagai beberapa pejabat yang terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta implimentasinya di kabupaten Padang pariaman, jika tidak ditemukan pemeliti akan memberikan saran untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran serta implementasinya terhadap capaian kinerja di Kabupaten Padang Pariaman.

Konsisten atau tidaknya antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran ini dapat dievaluasi dengan menggunakan instrumen Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP). Analisis konsistensi yang diformulasikan dengan matrik konsolidasi perencanaan dan penganggaran (MKPP) merupakan alat bantu untuk mengkonsolidasi dokumen perencanaan dan penganggaran secara menyeluruh. MKPP disusun dengan membandingkan antara 2 (dua) dokumen perencanaan, yaitu melalui integrasi antara dokumen-dokumen berikut ini :

1. Integrasi Renstra SKPD dengan RPJMD
Program pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun dalam satu tabel pada kolom yang bersisian sehingga dapat dilihat mana program yang konsisten dan mana yang tidak konsisten.
2. Integrasi Rencana Kerja dengan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Program dan kegiatan pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun dalam satu tabel pada kolom yang bersisian sehingga dapat dilihat mana program dan kegiatan yang konsisten dan mana yang tidak konsisten.
3. Integrasi Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan RKPD
Program dan kegiatan pada RKPD Kab. Padang Pariaman dan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun dalam satu tabel pada kolom yang bersisian sehingga dapat dilihat mana program dan kegiatan yang konsisten dan mana yang tidak konsisten.
4. Integrasi PPAS Dis.Arsip&Perpus dengan Renja Dis.Arsip&Perpus

- Program dan kegiatan pada Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan PPAS Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun dalam satu tabel pada kolom yang bersisian sehingga dapat dilihat mana program dan kegiatan yang konsisten dan mana yang tidak konsisten.
5. Integrasi RKA Dis.Arsip&Perpus dengan PPAS Dis.Arsip&Perpus
Program dan kegiatan pada RKA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun dalam satu tabel pada kolom yang bersisian sehingga dapat dilihat mana program dan kegiatan yang konsisten dan mana yang tidak konsisten.
 6. Integrasi DPA Dis.Arsip&Perpus dengan RKA Dis.Arsip&Perpus
Program dan kegiatan pada DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan RKA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun dalam satu tabel pada kolom yang bersisian sehingga dapat dilihat mana program dan kegiatan yang

konsisten dan mana yang tidak konsisten.

Selanjutnya diidentifikasi apa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakkonsistenan antara dokumen dengan hasil wawancara peneliti dengan pejabat terkait yang menyebabkan tidak tercapainya capaian indikator kinerja daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran dianalisis berdasarkan konsistensi antara dokumen RPJMD, Renstra,RKPD, Renja,PPAS, RKA, DPA. Konsistensi Dokumen RENSTRA 2018-2022 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2018-2022. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 (SPPN) Pasal 7 dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 bahwa RENSTRA SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD

Tabel 2.
Matrik Konsolidasi Renstra Dis.Arsip&Perpus dengan RPJMD Kab Padang Pariaman

No	Status Program	2018		2019		2020		2021			2022			
		Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
1	Konsisten	Jumlah	11	63	11	63	11	63	6	20	71	6	20	71
		%	100		100		100		100		100		100	
2	Tidak Konsisten	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2018-2022 dan RPJMD Kab. Padang Pariaman yang diolah tahun 2023

1. Konsistensi RENSTRA pada RPJMD Tahun 2018. RPJMD memuat 11 program sedangkan RENSTRA memuat 11 program. Dari 11 program tersebut diantaranya bersesuaian dengan 11 program RPJMD. Artinya 100% program pada RENSTRA yang konsisten dengan program pada RPJMD.
2. Konsistensi RENSTRA pada RPJMD Tahun 2019. RPJMD memuat 11 program sedangkan RENSTRA memuat

11 program. Dari 10 program tersebut diantaranya bersesuaian dengan 11 program RPJMD. Artinya 100% program pada RENSTRA konsisten dengan program pada RPJMD.

3. Konsistensi RENSTRA pada RPJMD Tahun 2020. RPJMD memuat 11 program sedangkan RENSTRA memuat 11 program. Dari 11 program tersebut diantaranya bersesuaian dengan 11 program RPJMD. Artinya 100% program

- pada RENSTRA yang konsisten dengan program pada RPJMD.
4. Konsistensi RENSTRA pada RPJMD Tahun 2021. RPJMD memuat 6 program sedangkan RENSTRA memuat 6 program. Dari 6 program tersebut diantaranya bersesuaian dengan 6 program RPJMD. Artinya 100% program pada RENSTRA yang konsisten dengan program pada RPJMD.
 5. Konsistensi RENSTRA pada RPJMD Tahun 2022. RPJMD memuat 6 program sedangkan RENSTRA memuat 6 program. Dari 7 program tersebut diantaranya bersesuaian dengan 6 program RPJMD. Artinya 100% program pada RENSTRA yang konsisten dengan

program pada RPJMD.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait dapat di simpulkan bahwa program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD dikarenakan dalam penyusunan RENSTRA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berpedoman pada RPJMD Padang Pariaman.karena pada RPJMD sudah menampung seluruh program dan kegiatan yang di butuhkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Konsistensi Dokumen RKPD 2018-2022 dengan RENSTRA 2018-2022 Dis.Arsip&Perpus

Tabel 3.
Matrik Konsolidasi RKPD dengan RENSTRA Dis.Arsip&Perpus

No	Status Program	2018		2019		2020		2021		2022		
		Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	
1	Konsisten	Jumlah	11	63	11	63	11	63	6	20	6	20
		%	100	74,61	100	87,3			83,33	70		95
2	Tidak Konsisten	Jumlah	2	16		8			1	6		1
		%	18,18	25,39		12,7			16,67	30		5

Sumber: RKPD dan RENSTRA 2018-2022 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang diolah tahun 2023

1. Konsistensi RKPD pada RENSTRA Tahun 2018. RENSTRA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 terdapat 11 program dan 63 kegiatan dan RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2018 terdapat 13 program dan 47 kegiatan. Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 11 program pada RENSTRA terdapat 11 program pada RKPD yang sesuai dengan program RENSTRA, artinya 100% program pada RENSTRA konsisten sedangkan 18,18% tidak sesuai. Dari 63 kegiatan pada RENSTRA terdapat 47 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada RKPD sedangkan sisanya 16 kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan pada RKPD, artinya 74,61% kegiatan pada RENSTRA konsisten dan sisanya

25,39% tidak konsisten. Penyebab tidak konsisten salah satunya yaitu Perubahan Prioritas. Prioritas pemerintah daerah bisa berubah dari waktu ke waktu. Program yang direncanakan dalam RENSTRA mungkin tidak lagi sesuai dengan prioritas saat ini yang tercermin dalam RKPD.

2. Konsistensi RKPD pada RENSTRA Tahun 2019. RENSTRA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 terdapat 11 program dan 63 kegiatan dan RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2019 terdapat 11 program dan 55 kegiatan. Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 11 program pada RENSTRA terdapat 11 program pada RKPD yang sesuai dengan program RENSTRA, artinya 100% program pada RENSTRA konsisten. Dari 63 kegiatan pada RENSTRA terdapat 55 kegiatan yang sesuai dengan

- kegiatan pada RKPD sedangkan sisanya 8 kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan pada RKPD, artinya 87,3% kegiatan pada RENSTRA konsisten dan sisanya 12,7% tidak konsisten. Salah satu penyebab tidak konsistennya kegiatan pada RENSTRA yaitu Perubahan Kebijakan. Perubahan dalam peraturan atau kebijakan pemerintah pusat atau daerah juga bisa memengaruhi konsistensi antara RENSTRA dan RKPD.
3. Konsistensi RKPD pada RENSTRA Tahun 2020. RENSTRA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 terdapat 11 program dan 63 kegiatan dan RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2020 terdapat 10 program dan 62 kegiatan. Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 11 program pada RENSTRA terdapat 10 program pada RKPD yang sesuai dengan program RENSTRA, artinya 100% program pada RENSTRA konsisten. Dari 63 kegiatan pada RENSTRA terdapat 62 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada RKPD, artinya 100% kegiatan pada RENSTRA konsisten.
4. Konsistensi RKPD pada RENSTRA Tahun 2021. RENSTRA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 terdapat 6 program dan 20 kegiatan dan RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 terdapat 5 program dan 14 kegiatan. Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 6 program pada RENSTRA terdapat 5 program pada RKPD yang sesuai dengan program RENSTRA, artinya 83,33% program pada RENSTRA konsisten sedangkan 16,67% tidak sesuai. Dari 20 kegiatan pada RENSTRA terdapat 14 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada RKPD sedangkan sisanya 6 kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan pada RKPD, artinya 70% kegiatan pada RENSTRA konsisten dan sisanya 30% tidak konsisten. Penyebab tidak konsistennya kegiatan pada RENSTRA yaitu Perubahan Anggaran. Kendala anggaran atau perubahan dalam sumber daya keuangan dapat menyebabkan program-program

tertentu tidak dapat dijalankan sesuai rencana dalam RKPD.

5. Konsistensi RKPD pada RENTRA Tahun 2022. RENSTRA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 terdapat 6 program dan 20 kegiatan dan RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022 terdapat 6 program dan 20 kegiatan. Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 6 program pada RENSTRA terdapat 6 program pada RKPD yang sesuai dengan program RENSTRA, artinya 100% program pada RENSTRA konsisten. Dari 20 kegiatan pada RENSTRA terdapat 19 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada RKPD, artinya 95% kegiatan pada RENSTRA konsisten dan sisanya 30% tidak konsisten. Penyebab tidak konsistennya yaitu Evaluasi Kinerja. Hasil evaluasi kinerja program-program yang dijalankan sebelumnya dapat mengungkapkan kebutuhan untuk menyesuaikan RENSTRA dan RKPD. Kedua yaitu Kondisi Eksternal, perubahan dalam kondisi eksternal seperti perubahan sosial, ekonomi, atau lingkungan bisa mempengaruhi konsistensi antara RENSTRA dan RKPD.

Konsistensi Dokumen RENJA 2018-2022 dengan RKPD 2018-2022 Dis.Arsip&Perpus

Usulan RENJA Dis.Arsip&Perpus diserahkan ke Bapelitbangda untuk dilakukan penyesuaian dengan RKPD kemudian dicocokan dengan program dan kegiatan pada RPJMD.Bapelitbangda kemudian melaksanakan musrenbang RKPD dan mengsinkronkan usulan RENJA dengan hasil musrenbang.Sinkronisasi usulan RENJA dengan hasil musrenbang RKPD melahirkan dokumen RKPD.Berdasarkan dokumen RKPD ini, di susun Kembali RENJA SKPD dalam hal ini adalah RENJA Dis.Arsip&Perpus.

Tabel 4.
Matrik Konsolidasi RENJA dengan RKPD Dis.Arsip&Perpus

No	Status Program	2018		2019		2020		2021		2022		
		Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	
1	Konsisten	Jumlah	13	47	11	55	10	62	5	14	6	19
		%		74,6	100	100	100	100	100	100	94,74	
2	Tidak Konsisten	Jumlah	13	13	0	0	0	0	0	0	1	
		%	100	25,4	0	0	0	0	0	0	5,26	

Sumber: RENJA dan RKPD 2018-2022 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang diolah tahun 2023

1. Konsistensi RENJA pada RKPD Tahun 2018. RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 terdapat 13 program dan 47 kegiatan dan RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2018 terdapat 13 program dan 60 kegiatan. Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 13 program pada RKPD terdapat 13 program yang sesuai dengan program RENJA, artinya 100% program pada RKPD konsisten. Dari 47 kegiatan pada RKPD terdapat 47 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada RENJA sedangkan sisanya 13 kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan pada RENJA, artinya 74,6% kegiatan pada RKPD konsisten dan sisanya 25,4% tidak konsisten. Salah satu penyebab tidak konsistennya yaitu Perubahan Prioritas Tahunan. Prioritas dan kebutuhan pemerintah daerah dapat berubah dari tahun ke tahun. RKPD adalah rencana jangka menengah, sedangkan RENJA adalah rencana tahunan, sehingga perubahan prioritas ini dapat menyebabkan perbedaan dalam program yang dipilih untuk dijalankan.
2. Konsistensi RENJA pada RKPD Tahun 2019. RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 terdapat 11 program dan 32 kegiatan dan RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2019 terdapat 10 program dan 57 kegiatan. Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 8 program pada RKPD terdapat 8 program yang sesuai dengan program RENJA, artinya 80% program pada RKPD konsisten sedangkan 20% tidak konsisten. Dari 32 kegiatan pada RKPD terdapat 32 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada RENJA sedangkan sisanya 25 kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan pada RENJA, artinya 56,15% kegiatan pada RKPD konsisten dan sisanya 43,85% tidak konsisten. Penyebab tidak

konsistennya yaitu pertama, keterbatasan sumber daya. Kadang-kadang, keterbatasan sumber daya seperti anggaran, personel, dan infrastruktur dapat menghambat pelaksanaan program yang direncanakan dalam RKPD, yang akhirnya dapat mengakibatkan perubahan program dalam RENJA. Kedua, perubahan kebijakan pusat. Perubahan kebijakan pemerintah pusat atau regulasi yang berlaku dapat mempengaruhi implementasi program di tingkat daerah, sehingga memerlukan penyesuaian program dalam RENJA. Ketiga, adanya evaluasi dan pembelajaran. Pada beberapa kasus, setelah implementasi program dari RKPD sebelumnya, terjadi evaluasi yang mengungkapkan perluasan atau perubahan program untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

3. Konsistensi RENJA pada RKPD Tahun 2020. RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 terdapat 10 program dan 62 kegiatan dan RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2020 terdapat 10 program dan 62 kegiatan. Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 10 program pada RKPD terdapat 10 program yang sesuai dengan program RENJA, artinya 100% program pada RKPD konsisten. Dari 62 kegiatan pada RKPD terdapat 62 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada RENJA, artinya 100% kegiatan pada RKPD konsisten.
4. Konsistensi RENJA pada RKPD Tahun 2021. RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 terdapat 5 program dan 14 kegiatan dan RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 terdapat 5 program dan 14 kegiatan. Pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 5 program pada RKPD terdapat sesuai dengan program

- RENJA, artinya 100% program pada RKPD konsisten. Dari 14 kegiatan pada RKPD terdapat 14 kegiatan sesuai dengan kegiatan pada RENJA, artinya 100% kegiatan pada RKPD konsisten.
5. Konsistensi RENJA pada RKPD Tahun 2022. RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 terdapat 6 program dan 19 kegiatan dan RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022 terdapat 6 program dan 18 kegiatan. Pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 6 program pada RKPD yang sesuai dengan program RENJA, artinya 100% program pada RKPD. Dari 19 kegiatan pada RKPD terdapat 18 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada RENJA, artinya 94,74% kegiatan pada RKPD konsisten dan sisanya 5,26% tidak konsisten. Alasan tidak konsistennya RENJA terhadap RKPD yaitu adanya anggaran Terbatas. Keterbatasan anggaran dapat memaksa pemerintah daerah untuk memilih program tertentu dalam RKPD yang akan dijalankan pada tahun tertentu, sementara program lain dalam RENJA mungkin harus ditunda atau diubah.

Alasan lain penyebab tidak konsistennya adalah penyusunan RENJA

Dis.Arsip&Perpus sejak tahun 2018 sd 2020 mengacu pada PERMENDAGRI Nomor 86 tahun 2017 sedangkan RENJA Dis.Arsip&Perpus tahun 2021 sd 2022 mengaju pada KEPMENDAGRI 050-5889 Tahun 2021. Akibatnya banyak program kegiatan yang tidak sesuai dengan RENSTRA. Beberapa program dan kegiatan dapat disesuaikan, namun beberapa program lainnya dipaksakan sesuai (hasil wawancara mendalam dengan pihak terkait).

Konsistensi PPAS 2018-2022 dengan RENJA 2018-2022 Dis.Arsip&Perpus

PPAS Dis.Arsip&Perpus disusun berdasarkan RENJA Dis.Arsip&Perpus. Beberapa program maupun kegiatan pada RENJA terpaksa ditunda atau dihilangkan pada PPAS karena keterbatasan anggaran. Penyusunan PPAS juga mengakomodir terhadap program dan kegiatan untuk yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) maupun dana APBN murni

Tabel 5
Matrik Konsolidasi PPAS dengan RENJA Dis.Arsip&Perpus

No	Status Program	2018		2019		2020		2021		2022		
		Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	
1	Konsisten	Jumlah	13	60	11	55	10	62	5	14	6	18
		%	100	100	81,82	100	100	100	100	100	100	
2	Tidak Konsisten	Jumlah	0	0	2	7	0	0	0	0	0	
		%	100	100	18,18	12,73	0	0	0	0	0	

Sumber: PPAS dan RENJA 2018-2022 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang diolah tahun 2023

1. Konsistensi PPAS pada RENJA Tahun 2018. RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 terdapat 13 program dan 60 kegiatan dan PPAS Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2018 terdapat 13 program dan 60 kegiatan. Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 13 program pada RENJA sesuai dengan program PPAS, artinya 100% program pada PPAS sesuai. Dari 60 kegiatan pada RENJA terdapat 60 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan

pada PPAS, artinya 100% kegiatan pada RENJA konsisten.

2. Konsistensi PPAS pada RENJA Tahun 2019. RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 terdapat 11 program dan 55 kegiatan dan PPAS Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2019 terdapat 9 program dan 62 kegiatan. Pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 9 program pada RENJA sesuai dengan program PPAS, artinya 81,82% program pada PPAS sesuai, sedangkan sisanya

- 18,18% tidak konsisten. Dari 55 kegiatan pada RENJA terdapat 55 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada PPAS, sedangkan 7 kegiatan tidak sesuai, artinya 100% kegiatan pada RENJA konsisten sedangkan 12,73% tidak konsisten. Penyebab adannya ketidak konsistennan yaitu : 1. Pendapatan daerah, terutama yang berasal dari penerimaan pajak dan transfer dari pemerintah pusat, dapat berfluktuasi. Perubahan dalam proyeksi pendapatan daerah dapat mempengaruhi kemampuan daerah untuk mendanai program-program yang direncanakan dalam RENJA. 2. Prioritas dan kebijakan pemerintah daerah dapat berubah seiring waktu, mungkin karena perubahan kebutuhan masyarakat atau perubahan politik. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam program yang direncanakan dalam RENJA. 3. Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, terutama terkait dengan alokasi dana transfer dan perubahan aturan perencanaan, dapat memengaruhi perubahan dalam PPAS dan RENJA. 4. Hasil evaluasi kinerja program-program yang dijalankan pada tahap sebelumnya mungkin mengungkapkan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih baik, yang dapat mengakibatkan perubahan dalam PPAS. 5. Perubahan dalam faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, bencana alam, atau perkembangan global, dapat mempengaruhi rencana dan alokasi sumber daya dalam PPAS dan RENJA. 6. Keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya dapat memaksa pemerintah daerah untuk mengkonsolidasi atau mengubah program-program yang ada sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
3. Konsistensi PPAS pada RENJA Tahun 2020. RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 terdapat 10

program dan 62 kegiatan dan RPPAS Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2020 terdapat 10 program dan 62 kegiatan., artinya 100% kegiatan pada RENJA konsisten dengan PPAS.

4. Konsistensi PPAS pada RENJA Tahun 2021. RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 terdapat 5 program dan 14 kegiatan dan PPAS Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 terdapat 5 program dan 14 kegiatan. Pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 5 program pada RENJA sesuai dengan program PPAS, artinya 100% program pada PPAS sesuai. Dari 14 kegiatan pada RENJA terdapat 14 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada PPAS, artinya 100% kegiatan pada RENJA konsisten..
5. Konsistensi PPAS pada RENJA Tahun 2022. RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 terdapat 6 program dan 18 kegiatan dan PPAS Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022 terdapat 6 program dan 18 kegiatan. Pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 6 program pada RENJA terdapat 6 program yang sesuai dengan program PPAS, artinya 100% program pada PPAS konsisten. Dari 18 kegiatan pada RENJA terdapat 18 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada PPAS, artinya 100% kegiatan pada RENJA konsisten.

Konsistensi RKA 2018-2022 dengan PPAS 2018-2022 Dis.Arsip&Perpus

PPAS yang telah disusun selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman sehingga menghasilkan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan dewan.Nota kesepakatan menjadi dasar penyusunan RKA SKPD

Tabel 6
Matrik Konsolidasi RKA dengan PPAS Dis.Arsip&Perpus

No	Status Program	2018		2019		2020		2021		2022		
		Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	
1	Konsisten	Jumlah	13	60	9	62	10	62	5	14	6	18
		%	76,93	66,67	100	59,68	100	58,06	100	100	100	94,44
2	Tidak Konsisten	Jumlah	3	20	0	25	0	27	0	1	0	1
		%	23,07	33,33	100	40,32	0	43,55	0	7,14	100	5,56

Sumber: RKA dan PPAS 2018-2022 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang di olah tahun 2023

1. Konsistensi RKA pada PPAS Tahun 2018. PPAS Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 terdapat 13 program dan 60 kegiatan dan RKA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2018 terdapat 10 program dan 40 kegiatan. Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 13 program pada RENJA terdapat 10 program yang sesuai dengan program RKA, artinya 76,93% program pada RKA sesuai, sedangkan sisanya 23,07 tidak konsisten. Dari 60 kegiatan pada PPAS terdapat 40 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada RKA, artinya 66,67% kegiatan pada RKA konsisten sedangkan sisanya 33,33% tidak konsisten. Salah satu penyebab terjadinya ketidak konsistennya yaitu adanya proyeksi pendapatan dalam PPAS mungkin tidak selalu mencerminkan pendapatan yang sebenarnya diterima oleh pemerintah daerah. Kondisi ekonomi yang berubah atau perubahan dalam penerimaan pajak dapat menyebabkan perbedaan antara PPAS dan RKA.
2. Konsistensi RKA pada PPAS Tahun 2019. PPAS Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 terdapat 9 program dan 62 kegiatan dan RKA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2019 terdapat 9 program dan 37 kegiatan. Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 9 program pada RENJA terdapat 9 program yang sesuai dengan program RKA, artinya 100% program pada RKA konsisten. Dari 62 kegiatan pada PPAS terdapat 37 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada RKA, artinya 59,68% kegiatan pada RKA konsisten sedangkan

sisanya 40,32% tidak konsisten. Salah satu penyebab adanya ketidak konsistennya yaitu Pemerintah daerah dapat mengubah prioritas atau kebijakan selama tahun anggaran berjalan, yang memengaruhi alokasi dana dan program-program dalam RKA.

3. Konsistensi RKA pada PPAS Tahun 2020. PPAS Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 terdapat 10 program dan 62 kegiatan dan RKA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2018 terdapat 10 program dan 36 kegiatan. Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 10 program pada PPAS terdapat 10 program yang sesuai dengan program RKA, artinya 100% program pada RKA konsisten. Dari 62 kegiatan pada PPAS terdapat 36 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada RKA, artinya 58,06% kegiatan pada RKA konsisten sedangkan sisanya 43,55% tidak konsisten. Salah satu penyebab ketidak konsistennya yaitu adanya perubahan dalam faktor eksternal, seperti bencana alam yaitu covid 19 yang melanda Indonesia sehingga anggaran lebih banyak di alokasikan untuk bidang Kesehatan dan perkembangan ekonomi global, dapat memaksa perubahan dalam alokasi anggaran dalam RKA yang mungkin tidak sesuai dengan proyeksi dalam PPAS.
4. Konsistensi RKA pada PPAS Tahun 2021. PPAS Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 terdapat 5 program dan 14 kegiatan dan RKA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 terdapat 5 program dan 15 kegiatan. Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 5 program pada RENJA sesuai dengan

program RKA, artinya 100% program pada RKA konsisten. Dari 14 kegiatan pada PPAS terdapat 14 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada RKA, artinya 100% kegiatan pada RKA konsisten sedangkan sisanya 7,14 % tidak konsisten. Salah satu penyebab adanya ketidak konsistennan yaitu hasil evaluasi program-program yang sedang berjalan dapat mengungkapkan perlunya perubahan atau penyesuaian dalam alokasi anggaran yang tidak tercantum dalam PPAS dan lebih di fokuskan untuk anggaran kesehatan mengatasi covid 19.

5. Konsistensi RKA pada PPAS Tahun 2022. PPAS Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 terdapat 6 program dan 18 kegiatan dan RKA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022 terdapat 6 program dan 17 kegiatan. Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 6 program pada RKA terdapat 6 program yang sesuai dengan program PPAS, artinya 100% program pada PPAS

konsisten. Dari 18 kegiatan pada PPAS terdapat 17 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada RKA, artinya 94,44% kegiatan pada RKA konsisten sedangkan sisanya 5,56% tidak konsisten. Salah satu penyebab terjadinya ketidak konsistennan yaitu adanya kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dapat mengharuskan perubahan dalam alokasi dana dalam RKA yang mungkin tidak sesuai dengan proyeksi dalam PPAS yaitu alokasi dana untuk kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat akibat covid 19.

Konsistensi RKA 2018-2022 dengan DPA (APBD) 2018-2022 Dis.Arsip&Perpus

RKA SKPD yang telah dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan APBD (RAPBD), selanjutnya RAPBD di bahas bersama DPRD dengan perpedoman pada PPAS yang telah disepakati bersama (nota kesepakatan). Setelah disepakati Bersama maka di tetapkanlah APBD

Tabel 7
Matrik Konsolidasi RKA dengan DPA (APBD) Dis.Arsip&Perpus

No	Status Program	2018		2019		2020		2021		2022		
		Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	
1	Konsisten	Jumlah	10	40	9	37	10	36	5	15	6	17
		%	70	65	100	100	80	86,12	80	93,33	100	88,24
2	Tidak Konsisten	Jumlah	3	14	0	0	2	5	1	1	0	2
		%	30	35	0	0	10	13,88	20	6,67	0	11,76

Sumber: RKA dan DPA 2018-2022 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang diolah tahun 2023

1. Konsistensi RKA dengan DPA Tahun 2018. RKA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 terdapat 10 program dan 40 kegiatan dan DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2018 terdapat 7 program dan 26 kegiatan. Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa dari 10 program pada RKA terdapat 7 program yang sesuai dengan program DPA, artinya 70% program pada RKA sesuai, sedangkan sisanya 30% tidak konsisten. Dari 40 kegiatan pada RKA terdapat 26

kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada DPA, artinya 65% kegiatan pada DPA konsisten sedangkan sisanya 35% tidak konsisten. Penyebab adanya ketidak konsistennan yaitu keterbatasan sumber daya. terkadang, keterbatasan anggaran atau masalah pengelolaan sumber daya dapat menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam RKA.

2. Konsistensi RKA dengan DPA Tahun 2019. RKA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang

- Pariaman Tahun 2019 terdapat 9 program dan 36 kegiatan dan DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2019 terdapat 9 program dan 36 kegiatan. Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa program pada RKA sesuai dengan program DPA, artinya 100% program pada RKA konsisten.
3. Konsistensi RKA dengan DPA Tahun 2020. RKA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 terdapat 10 program dan 36 kegiatan dan DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2020 terdapat 8 program dan 31 kegiatan. Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa dari 10 program pada RKA terdapat 8 program yang sesuai dengan program DPA, artinya 80% program pada RKA sesuai, sedangkan sisanya 20% tidak konsisten. Dari 36 kegiatan pada RKA terdapat 31 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada DPA, artinya 86,12% kegiatan pada DPA konsisten sedangkan sisanya 13,88% tidak konsisten. Adanya ketidak konsistennan yaitu adanya Perubahan Kebijakan. Kebijakan atau peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat dapat mengharuskan perubahan dalam program yang tercantum dalam DPA.
4. Konsistensi RKA dengan DPA Tahun 2021. RKA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 terdapat 5 program dan 15 kegiatan dan DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 terdapat 4 program dan 14 kegiatan. Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa dari 5 program pada RKA terdapat 4 program yang sesuai dengan program DPA, artinya 80% program pada RKA sesuai, sedangkan sisanya 20% tidak konsisten. Dari 15 kegiatan pada RKA terdapat 14 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada DPA, artinya 93,33% kegiatan pada DPA konsisten sedangkan sisanya 6,67% tidak konsisten. Penyebab ketidak konsistennan antara RKA dengan DPA pengurangan anggaran untuk urusan yang

tidak menjadi prioritas daerah dalam mengatasi covid 19, sehingga anggaran daerah yang ada lebih di khususkan untuk urusan kesehatan.

5. Konsistensi RKA dengan DPA Tahun 2022. RKA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 terdapat 6 program dan 17 kegiatan dan DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022 terdapat 6 program dan 15 kegiatan. Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa dari 6 program pada RKA terdapat 6 program yang sesuai dengan program DPA, artinya 100% program pada RKA konsisten. Dari 17 kegiatan pada RKA terdapat 15 kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pada DPA, artinya 88,24% kegiatan pada DPA konsisten sedangkan sisanya 11,76% tidak konsisten. Penyebab ketidak konsistennan antara RKA dengan DPA pengurangan anggaran untuk urusan yang tidak menjadi prioritas daerah dalam mengatasi covid 19, sehingga anggaran daerah yang ada lebih di khususkan untuk urusan kesehatan dan peningkatan ekonomi Masyarakat.

Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2018

Secara umum pencapaian target kinerja utama pada dinas karsipan dan perpustakaan kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2018, telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan atau sebesar 100%. Total realisasi belanja Dinas Karsipan dan Perpustakaan dalam tahun anggaran 2018 tercatat sebesar Rp. 3.449.658.762,00. Jumlah tersebut mencapai 98,01% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 3.519.675.810,96,00 Meskipun realisasi seluruh komponen belanja daerah berada dibawah anggaran namun sudah memenuhi prinsip 3E. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 2.235.395.765,00 atau 99,77 %, belanja barang dan Jasa sebesar Rp.850.650.551,00 atau 93,26%, belanja hibah sebesar Rp. 0.000 atau 0,00% dan belanja modal sebesar

Rp.363.612.446,00 atau 99,06% dari jumlah anggarannya,

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2019

Secara umum pencapaian target kinerja utama pada dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2019, telah terealisasi sesuai dengan target yang di tetapkan atau sebesar 100%. Total realisasi belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam tahun anggaran 2019 tercatat sebesar Rp. 4.046.021.963,00. Jumlah tersebut mencapai 97,02% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 4.170.181.206,09,00 Meskipun realisasi seluruh komponen belanja daerah berada dibawah anggaran namun sudah memenuhi prinsip 3E. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 2.456.778.826,00 atau 98,24 %, belanja barang dan Jasa sebesar Rp.1.171.322.608,00 atau 94,3%, belanja hibah sebesar Rp. 0.000 atau 0,00% dan belanja modal sebesar Rp.417.920.529,00 atau 97,81% dari jumlah anggarannya.

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2020

Secara umum pencapaian target kinerja utama pada dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2020, telah terealisasi melebihi target yang di tetapkan atau sebesar 114.88%. Total realisasi belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam tahun anggaran 2020 tercatat sebesar Rp. 3.176.281.696,00. Jumlah tersebut mencapai 98,63% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 3.220.347.660,49,00 Meskipun realisasi seluruh komponen belanja daerah berada dibawah anggaran namun sudah memenuhi prinsip 3E. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 2.168.483.698,00 atau 98,99%, belanja barang dan Jasa sebesar Rp.930.345.498,00 atau 97,99%, belanja hibah sebesar Rp. 0.00 atau 0,00% dan belanja modal sebesar Rp.77.452.500,00 atau 96,44% dari jumlah anggarannya.

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021

Secara umum pencapaian target kinerja utama pada dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2021, telah terealisasi melebihi target yang di tetapkan sebesar 114,88%, Total realisasi belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam tahun anggaran 2021 tercatat sebesar Rp. 3.316.445.311,00. Jumlah tersebut mencapai 98,43% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 3.369.403.278,00 Meskipun realisasi seluruh komponen belanja daerah berada dibawah anggaran namun sudah memenuhi prinsip 3E. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 2.340.163.257,00 atau 99,5 %, belanja barang dan Jasa sebesar Rp.976.282.054,00 atau 95,96%, belanja hibah sebesar Rp. 0.000 atau 0,00% dan belanja modal sebesar Rp. 0.00 atau 0,00% dari jumlah anggarannya.

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022

Secara umum pencapaian target kinerja utama pada dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2022, telah terealisasi sesuai dengan target yang di tetapkan atau rata-rata sebesar 93,50%.Total realisasi belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam tahun anggaran 2022 tercatat sebesar Rp. 5.314.798.359,00. Jumlah tersebut mencapai 93,51% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 5.683.453.665,00 Meskipun realisasi seluruh komponen belanja daerah berada dibawah anggaran namun sudah memenuhi prinsip 3E. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 2.695.838.945,00 atau 97,85%, belanja barang dan Jasa sebesar Rp.1.106.317.064,00 atau 94,32%, belanja hibah sebesar Rp. 0.000 atau 0,00% dan belanja modal sebesar Rp. 1.512.642.350,00 atau 86,18% dari jumlah anggarannya

Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian

Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1. Konsistensi perencanaan dan penganggaran pada dokumen Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar 96,66% dengan kategori sangat baik.
2. Konsistensi perencanaan dan penganggaran pada dokumen Rencana Strategis dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2022 di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar 68,92% dengan kategori baik.
 - a. Konsistensi perencanaan dan penganggaran pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Tahun 2018-2022 di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar 78,12% dengan kategori baik
3. Konsistensi perencanaan dan penganggaran pada dokumen Rencana Kerja dengan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Tahun 2018-2022 di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar 97,89% dengan kategori sangat baik
 - a. Konsistensi perencanaan dan penganggaran pada dokumen Plafon Prioritas Anggaran Sementara dengan Rencana Kerja Anggaran di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar 72,26% dengan kategori baik
4. Konsistensi perencanaan dan penganggaran pada dokumen Rencana Kerja Anggaran dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018-2022 di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar 90,22% dengan kategori sangat baik.

Faktor-Faktor Penyebab Tidak Konsisten/Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Ketidakkonsistenan program dan kegiatan pada dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran disebabkan oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pemerintah pusat

- tentang kewenangan pelaksanaan sebuah program atau kebijakan strategis pemerintah daerah
2. Kepentingan politik atau adanya tekanan politis untuk mengadakan suatu kegiatan
3. Kemampuan keuangan daerah
4. Kurangnya kualitas sumber daya manusia atau ketidak matangan SKPD dalam Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran
5. Kebijakan pimpinan daerah yang sering mengonta-ganti pemegang kebijakan di SKPD
6. Rendahnya komitmen dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran tersebut
7. Adanya bencana alam dan covid 19 yang melanda Kabupaten Padang Pariaman.
8. Adanya dana pusat (APBN) yang hadir dalam rentang waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran seperti Dana Alokasi Khusus (DAK)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis konsistensi antara RENSTRA dan RPJMD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Padang Pariaman Tahun 2018-2022 sudah cukup konsisten. Dimana hasil dari analisis konsistensi tersebut menunjukkan bahwa konsistensi antar program dan kegiatan sebesar 96,66%, hal ini menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik.
2. Analisis konsistensi antara RENSTRA dan RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Padang Pariaman Tahun 2018-2022 sudah cukup konsisten. Dimana hasil dari analisis konsistensi tersebut menunjukkan bahwa konsistensi antar program sebesar 84,62% dan konsistensi antar kegiatan sebesar 68,92%.
3. Analisis konsistensi antara RKPD dan RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Padang Pariaman Tahun 2018-2022 sudah cukup konsisten.

- Dimana hasil dari analisis konsistensi tersebut menunjukkan bahwa konsistensi antar program sebesar 92% dan konsistensi antar kegiatan sebesar 78,12%.
4. Analisis konsistensi antara RENJA dan PPAS Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Padang Pariaman Tahun 2018-2022 sudah cukup konsisten. Dimana hasil dari analisis konsistensi tersebut menunjukkan bahwa konsistensi antar program sebesar 96% dan konsistensi antar kegiatan sebesar 97,89%.
 5. Analisis konsistensi antara PPAS dan RKA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Padang Pariaman Tahun 2018-2022 sudah cukup konsisten. Dimana hasil dari analisis konsistensi tersebut menunjukkan bahwa konsistensi antar program sebesar 90,53% dan konsistensi antar kegiatan sebesar 72,26%.
 6. Analisis konsistensi antara RKA dan DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Padang Pariaman Tahun 2018-2022 sudah cukup konsisten. Dimana hasil dari analisis konsistensi tersebut menunjukkan bahwa konsistensi antar program sebesar 84,92% dan konsistensi antar kegiatan sebesar 90,22%.

Dalam rangka meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Padang Pariaman direkomendasikan untuk meningkatkan intensitas informasi dan komunikasi dengan pemerintah yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas SDM/pejabat perencana dalam membuat setiap kegiatan yang diajukan, meningkatkan pengetahuan aparatur yang terkait dalam penyusunan anggaran serta meningkatkan komitmen dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran tersebut.

KEPUSTAKAAN ACUAN

Abdul Kani,Dewi Marhaeni Diah Herawati,
Laksono Trisnantoro,Evaluasi

- Perencanaan dan Penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan.2012;Vol.15:131-139
- Agus, S. and Dyah, M. (2017). Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Daerah, Journal of Governance And Public Policy, Vol.4 No.1.
- Alferus Sanuari, Yundhy Hafizrianda, Siti Rofingatun (2015), Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Di Kabupaten Pegunungan Bintangstudi Kasus Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Tahun 2013- 2015, Jurnal Keuda Vol. 2 No. 2
- Anggi, R. (2016). Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Apip Supriadi, dkk. (2018). Analytical Hierarchy Process (AHP). Yogyakarta : Deepublish
- Azuar Juliandi, Irfan, Saprial Manurung,2014, Metodologi Penelitian Bisnis Konsep Dan Aplikasi, UMSUpress, Medan
- Bagdja, M. (2011). Pembangunan Ekonomi Wilayah. Bandung : UNPAD PRESS.
- Bastian,Indra.2006.Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia.Jakarta.Salemba Empat.
- Bilmari, P. (2018). Simposium Nasional Keuangan Negara (Implementasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Kpjm) Di Indonesia), Bogor Indonesia : Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
- Caiden and Wildavsky.1974.*Planning and Budgeting in Poor Countries*.Google Books
- Carlisle S. *Health Promotion,Advocacy and Health Inequalities:a conceptual framework*.Oxford Journal Medicine Health Promotion

- Internasional.2000:Vol.15/No,4:369-379
- Conyers,Diana&Hill,Peter.(1984).*An Introduction to Development Planning In The Trird World*.The Pitman Press LtdBath.Avon.Scotland
- Denas Symond.Kajian Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2006.Jurnal IMPK.2007;Vol.01/No.01:25- 31
- Deputi IV BPKP.(2005).Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi).BPKP,Jakarta.
- Ferdinandus, D. B., Candra, F. A., David, K. (2015), Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Jurnal Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya, Vol. 6 No. 2.
- Hamzan Wadi, (2020), Sistem Pendukung Keputusan Metode Analytic Hierarchy Process dengan PHP & MySQL, Turida Publisher
- Harun.(2009),Reformasi Akutansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia.Jakarta:Salemba Empat.
- Imam Hardjanto. Teori Pembangunan. Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press)
- Jhingan,M.L.(2000),Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Kadarsah, Suryadi dan M Ali Ramdani.(1998). Sistem Pendukung Keputusan. PT Remaja Rasdakarya, Bandung.
- Keban,Yeremias.T.(2004),Enam Dimensi Staregi Administrasi Publik, Konsep,Teori dan Isu.Yogyakarta.Gava Media.
- Mardiasmo.(2002),Akutansi Sektor Publik.Yogyakarta:Penerbit ANDI
- Mardiasmo.(2022),Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Meldayeni.(2011),Analisis Konsistenai Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan di Kota Solok Tahun 2007-2010.Tesis Pasca Sarjana Universitas Andalas
- Meri Darlina, Yannizar, Siti Hodijah (2016), Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 4.
- Muchlis, H. & Siti, I. (2016). Metodologi Penelitian Administrasi. Tangerang : Selatan Universitas Terbuka.
- Mudrajad, K. (2018). Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nofriyanto Triyono, Lintje Kalangi, Stanly Alexander (2019), Evaluasi Konsistensi Perencanaan Penganggaran Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA, Vol.7 No.3 Juli 2019
- Nurkholis dan Moh.Khusaini.(2018). Penganggaran Sektor Publik.Malang : Tim UB Press.
- Octavianti,Rini.(2008),Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Solok Selatan.Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas.
- Oekan, S. A. dan Dede, M. (2019). Isu-isu pembangunan pengantar teoritis.Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Osrinda Namira,Arman Delis.Analisis Konsistensi Prencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian Target Kinerja Pada Badang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin.Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah.2016.Vol.3 No.3:151-162
- Pembangunan Daerah).Penerbit Fakultasi Ekonomi Universitas Jambi.
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan

- Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- Ramadhiani Fitry.(2012),Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2010.Tesis Program Study Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik.Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia
- Rasyid Abdul.(2010),Analisi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Singkronisasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Jurnal Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua
- Saifuddin.(2007).Analisis Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak Pada Puskesmas di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2007.Tesis Program Study Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Administrasi Kebijakan Kesehatan. Program Pascasarjana Universitas Diponogoro, Semarang.
- Sasongko,Catur& Safrida Rumondang Parulian.(2010) Anggaran.Jakarta: Salemba Empat.
- s.
- Selfina, K. (2007). Konsistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Jayapura. Makassar: Tesis Program Magister Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono (2003), Statistika untuk Penelitian, CV. Alfabeta. Bandung
- Tan,Syamsurijal.(2012).Perencanaan Pembangunan (Tiori dan Implementasi Pada Tangkilisan, Nogi Hessel.(2005).Manajemen Publik.Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia
- Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Yohandarwati, A. (2013). Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi. Jakarta : Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral, Bappena